

ABSTRAK

Nurdiana Kholidah : “Penerapan Collaborative Governance Dalam Peningkatan Pajak Reklame Kota Bandung”

Penerimaan Pajak Reklame merupakan salah satu pajak yang dinilai potensial bagi kas pemerintah daerah Kota Bandung dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, sosia, Maupun budaya. Hal ini dikarenakan penerimaan pajak reklame yang meningkat berdampak positif bagi kestabilan keuangan daerah Kota Bandung. Namun, fakta empiris mengatakan bahwa pada tahun 2019-2021 penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung mengalami fluktuasi. Hal tersebut disebabkan oleh kurang maksimalnya penerapan proses *Collaborative Governance* yang di lakukan oleh pemerintah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Oleh karena itu adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menemukan, serta mengembangkan bagaimana penerapan proses *Collaborative Governance* dalam peningkatan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Penelitian ini menggunakan teori tentang proses Collaborative Governance dari Ansell and Gash : 2007, dengan lima dimensi yaitu *face to face* Dialog (Dialog Tatapmuka), *Trust Building* (Membangun Kepercayaan), *Commitment to the Process* (Komitmen terhadap Proses), *Shared Understanding* (Berbagi Pengertian/Informasi), *Intermediate Outcomes* (Hasil menengah/ sementara).

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, adapun teknik penggumyang digunakan yaitu : observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Selanjutnya penelitian ini menggunakan teknik analisis data dari Creswell (2010) yaitu: mengolah dan mempersiapkan data untuk kemudian dianalisis, membaca keseluruhan data, menganalisis lebih detail dengan melakukan koding data, menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan kategori, penyajian Informasi, penarikan kesimpulan melalui interpretasi data.

Berdasarkan teori dan metode yang digunakan maka penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung telah menerapkan proses Collaborative Governance yang pada umumnya sudah berjalan cukup baik. Namun masih ada salah satu dimensi dari proses *Collaborative Governance* yang dinilai masih kurang maksimal yaitu pada proses *face to face* dialogue, hal in terlihat dari kurangnya kegiatan diskusi dan evaluasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Adapun saran dari peneliti untuk pemeintah Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kota Bandung terkait bagaimana meningkatkan pajak reklame yaitu dengan mengacu dan mengikuti proses *Collaborative Governence* yang telah disarankan oleh para ahli. Peneliti juga menyarankan pemerintah semakin mempererat hubungan antar pemangku kepentingan agar terjadi peningkatan pajak reklame serta sesuai dengan target yang telah di tetapkan.

Kata kunci: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pajak Reklame, *Collaborative Governance*